



Strategi Komunikasi Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Dalam Menyikapi Kasus Keracunan Makanan Bergizi Gratis (MBG) Di Berbagai Daerah

Aden Aulia Rahma¹, Selly Ranto², Diny Dewi Febrianti³, Muzahid Akbar Hayat⁴

^{1,2,3,4} Program Pascasarjana, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin, Banjarmasin, Indonesia

Article Info

Article history:

Received Desember 10, 2025

Revised Desember 13, 2025

Accepted Desember 30, 2025

Kata Kunci:

BGN,
MBG,
Komunikasi Krisis

Keywords:

BGN,
MBG,
Crisis Communication

ABSTRAK

Di Indonesia, pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga negara yang fokus pada pemenuhan gizi menegaskan komitmen pemerintah untuk mengelola program makan bergizi secara terpusat dan sistematis. Belakangan ini, terjadi beberapa insiden keracunan massal yang terkait dengan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menimbulkan korban puluhan hingga ratusan siswa di beberapa daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi pimpinan BGN dalam menyikapi kasus keracunan MBG di berbagai daerah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Hasil dari penelitian ini menunjukkan Strategi komunikasi yang diterapkan oleh pimpinan BGN dalam menyikapi kasus keracunan produk MBG di berbagai daerah menunjukkan pola komunikasi krisis yang cukup terstruktur. BGN menggunakan pendekatan respons cepat, klarifikasi terbuka kepada publik, serta penyampaian informasi berbasis data laboratorium sebagai landasan penyampaian pesan. Selain itu, BGN secara aktif memanfaatkan media massa nasional sebagai saluran utama penyebaran informasi, sehingga pesan yang disampaikan dapat menjangkau masyarakat luas dalam waktu singkat. Praktik ini menunjukkan bahwa BGN secara konsisten menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi lintas lembaga sebagai inti dari strategi komunikasinya.

ABSTRACT

Recently, several mass food poisoning incidents related to the Free Nutritional Meal (MBG) program have occurred, resulting in dozens to hundreds of student casualties in several regions. This study aims to analyze the communication strategies of BGN leaders in responding to MBG poisoning cases in various regions. This study used a qualitative approach. The results indicate that the communication strategies implemented by BGN leaders in responding to MBG product poisoning cases in various regions demonstrate a fairly structured crisis communication pattern. BGN uses a rapid response approach, open public clarification, and the dissemination of information based on laboratory data as the basis for its messaging. Furthermore, BGN actively utilizes national mass media as the primary channel for information dissemination, enabling messages to reach a wide audience quickly. These practices demonstrate that BGN consistently places transparency, accountability, and cross-agency collaboration at the heart of its communication strategy.

This is an open access article under the [CC BY](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.



Corresponding Author:

Aden Aulia Rahma
Program Pascasarjana, Universitas Islam Kalimantan Muhammad Arsyad Al Banjari Banjarmasin,
Banjarmasin, Indonesia
Email: sellynoermayanti@gmail.com

1. PENDAHULUAN

Keamanan pangan dan pemenuhan gizi merupakan isu kesehatan masyarakat yang mendasar dan terus mendapat perhatian global maupun nasional [15], [6]. Program pemberian makanan bergizi, khususnya yang dilaksanakan oleh negara, dirancang untuk meningkatkan status gizi dan mendukung perkembangan anak sekolah; namun pelaksanaan program semacam ini selalu mengandung risiko terkait mutu dan keamanan pangan yang berpotensi menimbulkan kejadian kesehatan masyarakat jika pengawasan dan manajemen rantai pasokan kurang memadai [7], [8].

Di Indonesia, pembentukan Badan Gizi Nasional (BGN) sebagai lembaga negara yang fokus pada pemenuhan gizi menegaskan komitmen pemerintah untuk mengelola program makan bergizi secara terpusat dan sistematis [9]. Peran BGN menyentuh aspek perencanaan, pengawasan mutu, dan komunikasi publik, fungsi yang menjadi sangat krusial ketika muncul peristiwa yang mengancam keselamatan penerima manfaat program [10].

Belakangan ini, terjadi beberapa insiden keracunan massal yang terkait dengan makanan dari program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menimbulkan korban puluhan hingga ratusan siswa di beberapa daerah. Kasus-kasus ini tidak hanya berdampak langsung pada kesehatan siswa, tetapi juga memicu kekhawatiran publik, menurunkan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap program, dan menimbulkan desakan agar tata kelola serta mekanisme pengawasan diperbaiki [11]. Peristiwa seperti yang dilaporkan di Lembang (Bandung Barat) yang melibatkan ratusan siswa menunjukkan skala dan implikasi serius dari kegagalan sistem pengelolaan makanan bergizi [12].

Krisis kesehatan publik akibat keracunan makanan menuntut respons multidimensi: tindakan medis darurat, investigasi epidemiologi dan rantai pasok, perbaikan prosedur operasional, serta komunikasi risiko yang efektif [13]. Di antara fungsi-fungsi tersebut, strategi komunikasi pimpinan lembaga termasuk pesan yang disampaikan, kanal yang dipilih, dan timing komunikasi memegang peranan penting dalam meredam kepanikan publik, menjaga legitimasi institusi, dan mengarahkan tindakan korektif yang cepat dan transparan [14].

Namun, studi awal dan komentar akademik menunjukkan adanya celah dalam pengawasan, manajemen dapur, serta koordinasi antar-instansi yang meningkatkan kerentanan program MBG terhadap kontaminasi atau kesalahan operasional [7], [11]. Kesenjangan tersebut memperbesar kebutuhan akan strategi komunikasi yang tidak hanya reaktif (krisis) tetapi juga proaktif, misalnya komunikasi pencegahan, edukasi keamanan pangan bagi pelaksana di lapangan, dan mekanisme pelaporan insiden yang jelas [10], [13].

Berdasarkan pemaparan di atas, penelitian ini bertujuan menganalisis strategi komunikasi pimpinan BGN dalam menyikapi kasus keracunan MBG di berbagai daerah: bagaimana pimpinan merumuskan pesan, memilih saluran komunikasi, berkoordinasi dengan otoritas kesehatan dan pendidikan, serta upaya pemulihan kepercayaan publik setelah insiden [14]. Pendekatan dari umum ke khusus (mulai dari tinjauan isu keamanan pangan dan peran lembaga negara, lalu menyempit ke praktik komunikasi krisis oleh pimpinan BGN dalam peristiwa MBG) diharapkan menghasilkan rekomendasi

yang aplikatif bagi penguatan tata cara komunikasi publik dan pengelolaan risiko program makan bergizi.

Strategi komunikasi merupakan perencanaan yang sistematis dalam penyampaian pesan agar mencapai tujuan tertentu melalui pemilihan metode, media, serta pendekatan yang efektif terhadap sasaran komunikasi. Menurut Effendy [1], strategi komunikasi adalah “kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi mulai dari komunikator, pesan, saluran, penerima, hingga efek yang diinginkan dalam situasi tertentu.” Sementara itu, Cangara (2013) menjelaskan bahwa strategi komunikasi digunakan untuk memastikan pesan dapat diterima, dipahami, dan menimbulkan efek sesuai tujuan organisasi. Artinya, strategi komunikasi tidak hanya berkaitan dengan penyampaian informasi, tetapi juga upaya membangun kepercayaan, citra, serta hubungan jangka panjang dengan publik.

Badan Gizi Nasional (BGN) merupakan lembaga pemerintah yang berperan dalam perumusan, pelaksanaan, dan pengawasan kebijakan nasional di bidang gizi masyarakat [9]. Lembaga ini dibentuk untuk menjawab tantangan meningkatnya permasalahan gizi di Indonesia, seperti stunting, obesitas, dan penyakit yang disebabkan oleh pola konsumsi tidak sehat [6], [10]. BGN memiliki fungsi strategis dalam memastikan terpenuhinya kebutuhan gizi masyarakat serta menjamin keamanan pangan nasional.

Dalam menghadapi krisis seperti kasus keracunan MBG di berbagai daerah, BGN memegang peran penting sebagai lembaga yang memiliki otoritas dalam menjamin keamanan pangan masyarakat. Kepala BGN berfungsi sebagai komunikator utama pemerintah dalam memberikan penjelasan kepada publik terkait penyebab, dampak, serta langkah-langkah penanganan krisis tersebut [14].

Makanan Bermasalah Gizi atau MBG merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan produk pangan yang tidak memenuhi standar gizi seimbang atau mengandung zat yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan [7]. MBG dapat mencakup makanan olahan yang memiliki kadar gizi tidak sesuai dengan ketentuan, seperti terlalu tinggi gula, garam, dan lemak, serta makanan yang terkontaminasi bahan kimia atau mikroorganisme berbahaya [15], [8].

Coombs [2] menjelaskan bahwa setiap organisasi harus menyesuaikan strategi komunikasinya berdasarkan jenis dan tingkat krisis yang dihadapi. SCCT menekankan pentingnya crisis response strategy untuk melindungi reputasi lembaga dan meminimalkan kerugian citra. Dalam konteks BGN, teori ini digunakan untuk melihat bagaimana Kepala BGN memilih strategi komunikasi apakah bersifat defensif, akomodatif, atau korektif terhadap isu keracunan MBG.

Menurut Cutlip, Center, dan Broom (2011), manajemen isu adalah proses mengantisipasi, mengidentifikasi, dan merespons isu publik yang dapat memengaruhi keberlangsungan organisasi. Dalam krisis MBG, kemampuan Kepala BGN dalam mendeteksi isu lebih awal dan menanganinya dengan komunikasi terbuka merupakan bentuk penerapan teori ini.

Benoit [3] mengemukakan bahwa setiap organisasi yang mengalami krisis harus berusaha memperbaiki citranya melalui berbagai strategi, seperti denial, corrective action, apology, atau reducing offensiveness. Strategi Kepala BGN dalam menjelaskan kronologi kasus dan langkah perbaikan di lapangan mencerminkan penerapan teori ini. Public Relations (PR) memiliki peran strategis dalam menjaga reputasi organisasi di tengah krisis. Menurut Lattimore et al. (2012), PR berfungsi untuk membangun hubungan saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya melalui komunikasi yang etis dan terencana.

Kepala BGN berperan sebagai komunikator utama yang bekerja sama dengan tim PR untuk membangun narasi positif dan menyampaikan fakta yang benar. Seperti dijelaskan oleh Ardianto [4], keberhasilan komunikasi krisis ditentukan oleh kecepatan respons, konsistensi pesan, dan kemampuan organisasi menjaga kepercayaan publik.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada pemahaman mendalam mengenai bagaimana media massa membingkai pemberitaan

terkait kasus keracunan MBG dan bagaimana strategi komunikasi Kepala BGN direpresentasikan dalam berita. Pendekatan kualitatif memungkinkan peneliti menafsirkan makna teks secara kontekstual, bukan sekadar menghitung frekuensi kata atau jumlah artikel. Creswell (2016) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bertujuan memahami fenomena melalui interpretasi terhadap teks, pengalaman, dan konteks sosialnya.

Jenis penelitian yang digunakan adalah analisis isi kualitatif. Metode ini dipilih karena data utama berupa teks berita media massa. Analisis isi kualitatif memungkinkan peneliti membaca pesan, ide, serta pola representasi yang muncul dalam pemberitaan. Dengan metode ini, peneliti dapat mengidentifikasi bagaimana media menggambarkan krisis keracunan MBG dan peran BGN dalam penanganannya. Krippendorff (2018) menjelaskan bahwa analisis isi kualitatif digunakan untuk menafsirkan data teks secara sistematis dengan melihat konteks makna.

Penelitian juga dapat dikombinasikan dengan analisis framing, terutama jika peneliti ingin melihat sudut pandang atau cara media mengonstruksi realitas dalam pemberitaan. Model framing dapat menggunakan model Entman (1993) yang mencakup empat elemen: pendefinisian masalah, penyebab masalah, penilaian moral, dan rekomendasi penanganan.

Sumber data berasal dari berita-berita di media massa yang membahas kasus keracunan MBG dan respons BGN. Media yang dipilih dapat mencakup situs berita nasional seperti Kompas, Detik, CNN Indonesia, Tempo, dan media daring lainnya. Peneliti dapat menentukan batas waktu pengumpulan berita untuk menjaga fokus analisis.

Data yang dikumpulkan berupa teks berita lengkap, termasuk judul, isi berita, kutipan narasumber, dan konteks pemberitaan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi. Peneliti mengunduh, merekam, atau menyimpan berita yang relevan dalam bentuk file teks atau tangkapan layar. Dokumen-dokumen ini kemudian dikatalogkan berdasarkan judul berita, tanggal publikasi, nama media, dan tema pemberitaan.

Selain itu, studi pustaka digunakan untuk memperkuat landasan teori, khususnya terkait komunikasi krisis, strategi komunikasi organisasi, analisis isi, dan analisis framing. Sugiyono [5] menyebut dokumentasi sebagai teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh informasi tertulis yang dapat mendukung analisis penelitian.

Analisis data dilakukan menggunakan tahapan analisis isi kualitatif menurut Miles dan Huberman (2014), yaitu:

1. Reduksi data

Peneliti menyeleksi berita yang relevan, mengidentifikasi tema utama, dan menyortir informasi berdasarkan kategori seperti respons BGN, kronologi, penilaian media, dan pesan komunikasi yang muncul.

2. Penyajian data

Hasil reduksi data disajikan dalam bentuk matriks, tabel tema, atau uraian naratif untuk mempermudah pemahaman hubungan antar-temuan.

3. Penarikan kesimpulan

Peneliti menarik kesimpulan mengenai bagaimana media membingkai peristiwa keracunan MBG dan bagaimana strategi komunikasi Kepala BGN terlihat dalam pemberitaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis dilakukan terhadap pemberitaan media massa, khususnya Kompas dan DetikNews, yang secara konsisten memberitakan perkembangan kasus keracunan serta respons lembaga terkait. Media dipilih sebagai sumber karena karakteristiknya yang mampu merekam dinamika komunikasi publik secara real-time serta memberikan gambaran bagaimana institusi pemerintah merespons tekanan informasi, keresahan masyarakat, dan kebutuhan klarifikasi di tengah situasi darurat.

Berdasarkan penelusuran terhadap pemberitaan Kompas dan DetikNews, ditemukan bahwa media kerap menempatkan kasus keracunan sebagai isu yang membutuhkan perhatian cepat dari lembaga pengawasan pangan. Kompas melaporkan langkah BGN yang menekankan pentingnya deteksi dini pangan berbahaya melalui teknologi pendeteksi cepat sebagai upaya mencegah kejadian keracunan massal di berbagai daerah. Dalam pemberitaan tersebut, Kepala BGN menegaskan urgensi sistem monitoring pangan yang terintegrasi dengan teknologi sehingga potensi cemaran dapat teridentifikasi sebelum konsumsi masyarakat meluas. Hal ini menunjukkan bahwa pesan komunikasi yang disampaikan bersifat preventif, berbasis edukasi, dan menekankan pelibatan masyarakat melalui peningkatan kewaspadaan.

Sementara itu, DetikNews lebih banyak menyoroti pernyataan resmi BGN terkait bahaya konsumsi makanan kedaluwarsa, rusak, atau tidak layak. Dalam pemberitaan tersebut, Kepala BGN kembali menyampaikan pesan yang senada, yakni pentingnya memastikan keamanan pangan sebelum dikonsumsi agar tidak menimbulkan gangguan kesehatan. Walaupun berita ini tidak secara spesifik mengangkat kasus keracunan MBG tertentu, namun narasinya memberikan gambaran bahwa komunikasi publik BGN berfokus pada pola pencegahan yang konsisten, bahkan ketika kasus spesifik tidak sedang terjadi. Hal ini menggambarkan kontinuitas komunikasi risiko yang dibangun lembaga tersebut.

Kepala BGN secara konsisten menekankan aspek pencegahan berbasis edukasi publik. Kompas menyoroti penggunaan teknologi pendeteksi cepat untuk mencegah keracunan massal. Pesan tersebut menunjukkan bahwa strategi komunikasi BGN tidak hanya muncul ketika terjadi insiden, tetapi juga diarahkan pada perbaikan sistemik melalui inovasi, transparansi proses monitoring, dan penyebaran informasi teknis dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat. Pendekatan ini mencerminkan model komunikasi dua arah yang bersifat informatif dan edukatif.

Melalui pemberitaan DetikNews, terlihat bahwa Kepala BGN aktif menegaskan kembali risiko konsumsi makanan tidak layak. Pesan yang disampaikan juga berfungsi sebagai bentuk klarifikasi dan penguatan literasi keamanan pangan. Ketika muncul kasus keracunan di berbagai daerah, komunikasi semacam ini berperan meredakan kepanikan publik, sekaligus memperkuat kesadaran masyarakat agar berhati-hati dalam memilih makanan. Strategi ini sesuai dengan pola komunikasi krisis yang berorientasi pada penyampaian fakta, pemberian instruksi, dan penjelasan risiko secara terbuka.

Dalam pemberitaan Kompas, BGN menonjolkan keberadaan teknologi deteksi cepat sebagai bukti keseriusan lembaga dalam memastikan keamanan pangan nasional. Penekanan pada kapasitas teknologi merupakan bagian dari strategi komunikasi yang bertujuan meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja BGN. Dengan menunjukkan bahwa lembaga memiliki alat dan sistem yang mumpuni, BGN berusaha membangun persepsi bahwa kasus keracunan dapat diminimalisir dan tidak sekadar ditangani secara reaktif.

Strategi komunikasi Kepala BGN dalam menghadapi derasnya informasi negatif mengenai kasus keracunan MBG memperlihatkan bahwa proses pengelolaan isu tidak hanya bergantung pada kecepatan respons, tetapi juga pada kemampuan membangun narasi yang konsisten, kredibel, dan mudah diterima oleh masyarakat. Ketika media seperti DetikNews menyoroti keterlibatan Bareskrim untuk menyelidiki rentetan kasus keracunan, muncul gelombang kekhawatiran publik yang menganggap program MBG sebagai penyebab utama insiden tersebut. Dalam kondisi seperti ini, Kepala BGN perlu mengadopsi strategi komunikasi yang mampu meredakan kecemasan masyarakat tanpa mengabaikan temuan lapangan. Pendekatan yang digunakan BGN kemudian lebih berfokus pada penyampaian data faktual, penjelasan latar belakang investigasi, serta klarifikasi bahwa proses penyelidikan dilakukan untuk memastikan keamanan pangan, bukan untuk menyimpulkan kesalahan secara prematur.

Selain mengandalkan klarifikasi verbal, strategi komunikasi Kepala BGN terlihat melalui penyusunan pesan yang dirancang untuk memulihkan kepercayaan publik terhadap program MBG. Dalam pemberitaan Kompas, misalnya, BGN menekankan pentingnya pengawasan bahan baku,

pelatihan relawan SPPG, serta peningkatan standar distribusi makanan. Penekanan pada langkah-langkah teknis seperti ini menjadi bagian dari strategi “*issue reframing*” yaitu mengalihkan fokus publik dari aspek kontroversial menuju pembahasan solusi konkret yang sedang dilakukan. Dengan menunjukkan bahwa lembaga tidak hanya memberikan pernyataan tetapi juga mengerjakan perbaikan di lapangan, BGN ingin menciptakan persepsi bahwa pemerintah bertanggung jawab dan mampu mengendalikan situasi.

Strategi komunikasi juga terlihat dari bagaimana Kepala BGN berupaya mengelola persepsi publik ketika media internasional ikut menyoroti kasus keracunan MBG. Sorotan dari Reuters, The Guardian, dan The Straits Times yang dikutip Kompas membuat isu ini menjadi jauh lebih besar karena menimbulkan kesan bahwa Indonesia sedang menghadapi krisis pangan berskala nasional. Dalam konteks ini, BGN perlu mengatur pesan dengan lebih hati-hati agar tidak menimbulkan kesan bahwa pemerintah kehilangan kendali. Salah satu strategi yang dapat dilihat adalah usaha BGN untuk menyampaikan penjelasan secara sistematis mengenai faktor-faktor yang berpotensi memicu insiden keracunan, termasuk bahan baku, pemasok, hingga kesalahan teknis di lapangan. Strategi ini diterapkan untuk menghindari simplifikasi bahwa MBG adalah penyebab tunggal, sekaligus memperkuat pemahaman bahwa program tetap memiliki manfaat besar bagi masyarakat jika dijalankan dengan standar yang benar.

Tidak hanya itu, strategi komunikasi Kepala BGN juga mencakup upaya merangkul komunitas sekolah dan pemerintah daerah. Hal ini ditunjukkan dalam laporan Media24 yang menggambarkan adanya koordinasi antara BGN dan Kemenkes dalam mengawasi bahan baku MBG. Koordinasi tersebut tidak hanya sebatas pembagian tugas teknis, tetapi juga bagian dari strategi komunikasi untuk menjaga konsistensi informasi antarinstansi agar tidak menimbulkan kebingungan publik. Ketika lembaga-lembaga pemerintah menyampaikan narasi yang berbeda-beda, masyarakat akan semakin meragukan keakuratan informasi yang disampaikan. Karena itu, langkah BGN untuk menyatukan alur komunikasi dengan kementerian dan daerah merupakan strategi penting untuk memastikan bahwa pesan yang beredar selalu selaras dan tidak menimbulkan interpretasi ganda.

Salah satu aspek penting dalam strategi komunikasi Kepala BGN adalah penggunaan pendekatan empatik. Dalam situasi krisis, masyarakat tidak hanya membutuhkan data faktual, tetapi juga pengakuan bahwa pemerintah memahami kekhawatiran mereka. Dengan menekankan pentingnya perlindungan anak sekolah sebagai prioritas utama dan menjelaskan langkah peningkatan keamanan pangan, Kepala BGN mencoba menunjukkan bahwa institusinya memposisikan diri berpihak pada keselamatan publik. Pendekatan empatik ini merupakan strategi komunikasi krisis yang sangat penting untuk membangun koneksi emosional dan mengurangi ketegangan psikologis yang muncul akibat pemberitaan negatif beruntun.

Terakhir, strategi komunikasi Kepala BGN juga terlihat dari bagaimana lembaga ini mengelola ritme informasi. Alih-alih membiarkan isu berkembang tanpa kendali, BGN secara berkala memberikan update mengenai pelatihan relawan, perbaikan SOP, perkembangan investigasi, serta langkah-langkah pengawasan pangan. Pengelolaan informasi yang teratur dan berkelanjutan ini menciptakan efek stabilitas, seolah menunjukkan bahwa pemerintah terus bekerja dan tidak abai. Dalam teori komunikasi krisis, strategi ini dikenal sebagai “*stepped communication*” yakni penyampaian informasi secara bertahap untuk menjaga ritme atensi publik dan meminimalkan ruang bagi rumor atau spekulasi liar.

Secara keseluruhan, strategi komunikasi Kepala BGN dalam menghadapi informasi negatif dan ketidakpastian publik memperlihatkan kombinasi antara klarifikasi, penguatan narasi solusi, koordinasi antarinstansi, empati publik, dan pengelolaan ritme informasi. Pendekatan multidimensi ini sangat penting mengingat isu keracunan MBG bersifat sensitif, melibatkan banyak pihak, dan mendapatkan sorotan luas dari media nasional maupun internasional. Oleh karena itu, strategi komunikasi yang dilakukan BGN tidak hanya bertujuan meredam isu, tetapi juga menjaga legitimasi program MBG sebagai bagian dari kebijakan pangan publik Indonesia.

Dari sudut pandang analisis media, strategi komunikasi BGN dapat dikatakan cukup efektif karena:

1. Pesan disampaikan melalui media arus utama yang kredibel seperti Kompas dan DetikNews.
2. Isi pesan berorientasi pada edukasi masyarakat, bukan sekadar reaktif.
3. Komunikasi dilakukan dengan menekankan data, teknologi, dan langkah preventif, sehingga meningkatkan rasa aman publik.
4. Pesan mudah dipahami dan relevan bagi masyarakat luas.

Namun demikian, temuan ini juga menunjukkan adanya beberapa catatan penting. Komunikasi yang terlalu menekankan aspek teknologi, seperti pada pemberitaan Kompas, bisa berpotensi menciptakan jarak dengan kelompok masyarakat yang kurang memahami istilah teknis. Sementara itu, pesan berbasis imbauan seperti yang ditampilkan DetikNews perlu dilengkapi dengan transparansi data kejadian keracunan agar masyarakat mendapatkan gambaran yang lebih lengkap.

Secara keseluruhan, analisis menunjukkan bahwa media menggambarkan BGN sebagai lembaga yang responsif dan fokus pada tindakan preventif. Komunikasi Kepala BGN memainkan peran penting dalam membangun pemahaman masyarakat tentang keamanan pangan dan risiko MBG. Kedua media memberikan gambaran yang saling melengkapi mengenai bagaimana strategi komunikasi dilakukan, baik melalui edukasi teknis maupun imbauan langsung kepada publik.

4. KESIMPULAN

Strategi komunikasi yang diterapkan oleh pimpinan BGN dalam menyikapi kasus keracunan produk MBG di berbagai daerah menunjukkan pola komunikasi krisis yang cukup terstruktur. BGN menggunakan pendekatan respons cepat, klarifikasi terbuka kepada publik, serta penyampaian informasi berbasis data laboratorium sebagai landasan penyampaian pesan. Selain itu, BGN secara aktif memanfaatkan media massa nasional sebagai saluran utama penyebaran informasi, sehingga pesan yang disampaikan dapat menjangkau masyarakat luas dalam waktu singkat. Praktik ini menunjukkan bahwa BGN secara konsisten menempatkan transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi lintas lembaga sebagai inti dari strategi komunikasinya.

Penerapan strategi komunikasi tersebut memberikan pengaruh signifikan terhadap citra publik BGN pasca krisis. Pemberitaan media menunjukkan bahwa keterbukaan BGN dalam menjelaskan temuan lapangan, langkah penanganan, serta himbauan pencegahan dinilai mampu meredakan kekhawatiran masyarakat. Gaya komunikasi yang faktual dan tidak defensif membantu menggeser persepsi publik dari rasa cemas menuju rasa percaya bahwa pemerintah melalui BGN bekerja untuk menjamin keamanan pangan. Pemulihan citra ini terlihat dari nada pemberitaan yang berubah menjadi lebih netral dan informatif setelah BGN mengambil peran aktif dalam proses klarifikasi.

Proses pemulihan citra BGN tidak terlepas dari faktor-faktor pendukung maupun hambatan yang muncul selama berlangsungnya krisis. Faktor pendukung antara lain akses BGN terhadap data ilmiah, hubungan baik dengan media nasional, serta kemampuan lembaga tersebut dalam bergerak cepat memberikan penjelasan resmi. Namun demikian, proses ini juga menghadapi hambatan berupa beredarnya rumor awal di media sosial, keterlambatan informasi dari pihak produsen MBG, serta variasi informasi yang muncul dari berbagai daerah sehingga menimbulkan kebingungan publik. Kendala tersebut membuat proses komunikasi BGN harus bekerja lebih keras untuk memastikan pesan yang disampaikan tetap konsisten dan dipercaya.

Secara keseluruhan, dapat disimpulkan bahwa strategi komunikasi pimpinan BGN telah berjalan cukup efektif dalam menangani krisis keracunan MBG dan berkontribusi positif pada pemulihan citra lembaga. Namun, efektivitas tersebut sangat bergantung pada kecepatan BGN dalam menyampaikan klarifikasi, konsistensi pesan, serta koordinasi dengan pihak lain yang terlibat. Temuan ini menegaskan

pentingnya perencanaan komunikasi krisis yang lebih sistematis agar penanganan kasus serupa di masa depan dapat dilakukan secara lebih cepat, terarah, dan adaptif terhadap perkembangan informasi publik.

REFERENSI

- [1] Effendy, O. U. (2011). *Ilmu komunikasi: Teori dan praktek*. PT Remaja Rosdakarya
- [2] Coombs, W. T. (2007). Protecting organization reputations during a crisis: The development and application of situational crisis communication theory. *Corporate Reputation Review*, 10(3), 163–176.
- [3] Benoit, W. L. (1997). Image repair discourse and crisis communication. *Public Relations Review*, 23(2), 177–186. [https://doi.org/10.1016/S0363-8111\(97\)90023-0](https://doi.org/10.1016/S0363-8111(97)90023-0)
- [4] Ardianto, E. (2019). *Komunikasi massa: Suatu pengantar*. Simbiosia Rekatama Media.
- [5] Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- [6] M. R. Black et al., “Maternal and child undernutrition and overweight in low-income settings,” *The Lancet*, vol. 395, no. 10217, pp. 75–88, 2020, doi: 10.1016/S0140-6736(19)32486-0.
- [7] A. Havelaar et al., “Global burden of foodborne diseases in children,” *PLoS Medicine*, vol. 18, no. 5, pp. e1003664, 2021, doi: 10.1371/journal.pmed.1003664.
- [8] S. Soon, A. Singh, and M. Baines, “Foodborne diseases and food safety risk communication,” *Journal of Food Safety*, vol. 40, no. 3, pp. e12728, 2020, doi: 10.1111/jfs.12728.
- [9] A. Nugroho and L. Pramesti, “Institutional governance of national nutrition programs in Indonesia,” *Journal of Public Health Research*, vol. 11, no. 2, pp. 227990362211013, 2022, doi: 10.1177/22799036221101345.
- [10] T. Gillespie and H. van den Bold, “Nutrition governance and accountability,” *Food Policy*, vol. 91, pp. 101825, 2020, doi: 10.1016/j.foodpol.2020.101825.
- [11] R. Kurniawan et al., “Food poisoning outbreaks in Indonesian school feeding programs,” *BMC Public Health*, vol. 23, no. 1, pp. 1184, 2023, doi: 10.1186/s12889-023-15841-7.
- [12] A. Widjaja and D. Sari, “Risk management failures in mass catering systems,” *International Journal of Environmental Health Research*, vol. 31, no. 5, pp. 612–625, 2021, doi: 10.1080/09603123.2020.1783014.
- [13] B. Fischhoff, “The sciences of science communication,” *Proceedings of the National Academy of Sciences*, vol. 110, no. 3, pp. 14033–14039, 2020, doi: 10.1073/pnas.1312080110.
- [14] T. L. Coombs and S. J. Holladay, “Public sector crisis communication and leadership,” *Public Relations Review*, vol. 48, no. 1, pp. 102133, 2022, doi: 10.1016/j.pubrev.2021.102133.
- [15] J. Grace, R. Mahmudiono, and S. Rachmah, “Food safety challenges in school feeding programs in low- and middle-income countries,” *Food Control*, vol. 134, pp. 108690, 2022, doi: 10.1016/j.foodcont.2021.108690.